BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIKOM

2.1. Sejarah Perusahaan

Didalam dekade 1945-1978, keadaan politik jawatan kehutanan hanya dapat menjalankan tugasnya di Sumatra dan Jawa saja dengan susunan organisasi sangat sederhana. Di Jawa Barat sebagai pimpinan pada waktu itu adalah R.O Nurhadi yang diangkat sebagai Inspektur Kehutanan Bagian I Bandung dengan surat ketetapan menteri Depertemen Kemakmuran tanggal 21 Oktober 1945 NO.735/A/keh. Pada masa revolusi itu tugas pokok jawatan kehutanan adalah turut mempertahankan *defacto* Republik Indonesia dan menyelamatkan harta kekayaan negara bersama militer dan pemerintah sipil lainnya.

Tahun 1947 di Jawa Barat terbentuk Negara Pasundan dan Instansi Kehutanan yang berubah menjadi *De Dienst Van Set Boswezen Negara Pasundan* yang dipimpin oleh Ir.C.Y Moul sampai dengan tahun 1949. Pada tahun ini juga kehutanan mulai disusun secara federatif dan pada pertengahan tahunnya dibentuk satu bagian baru yang disebut Planologi Kehutanan yang terpisah dari pengelolaan dipimpin oleh R.H.Prawiradireja sampai tahun 1952.

Pada tahun 1951 terbit surat keputusan Kepala Jawatan Kehutanan tertanggal 17 November 1951 No.4212 yang memutuskan bahwa terhitung 1 September 1951 dibentuk Brigade Planologi Kehutanan Jawa Barat yang dipimpin oleh R.Oesman Nandika. Peraturan Pemerintah No.20/1952 menetapkan kehutanan di Jawa/Madura dibagi-bagi menjadi beberapa Inspeksi Kehutanan bagian I.

Bertindak menjadi Inspektur pada waktu itu ialah R.Koesnawarso. Pada tahun 1953 Kepala Jawatan Kehutanan dengan surat keputusan tanggal 1 Oktober 1953 No.27777/KD/1/5 mengukuhkan susunan organisasi tiap inspeksi sehingga mempertegas garis komandan dan koordinasi.

Oleh karena itu pada tahun 1954 M.Saroso meninggal dunia maka R.Oesman Nandika yang semula menjabat Kepala Brigade I Planologi Kehutanan Jawa Barat dan tempatnya kemudian di Brigade diisi oleh Adang Durachman.

Pada tahun 1957 terbit peraturan Pemerintah No.64/1957 yang menetapkan penyerahan sebagian dari urusan pemerintah Pusat dilapangan perikanan laut. Kehutanan dan perkebunan karet rakyat berubahlah status Inspeksi Kehutanan Bagian I menjadi Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Jawa Barat R.Oesman Nandika selaku Kepala Dinas yang pertama yang menduduki jabatan sampai tahun 1971.

Pada awal tahun 1971 sampai Mei 1971 Dinas Kehutanan propinsi daerah tingkat I JawaBarat dipimpin oleh Ir.Sulaeman Partadisastra yang selanjutnya digantikan oleh Rd.Usman Mu'min B.Sc sebagai pejabat Kepala Dinas Definitif sampai akhir bulan Februari 1978.

Akan halnya Brigade Planologi Kehutanan Jawa Barat peiode 1961-1971 mengalami dua kali pergantian yaitu Ir.Yunus Kartasubrata dan Andi Abdul Riva'i yang selanjutnya diganti oleh Ir.M.Simbolon sampai awal tahun 1978.

Pada awal tahun 1978 status Dinas Kehutanan propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat berubah menajdi unit III Perum Pehutani Jawa Barat berdasarkan Peraturan

Pemerintah No.2 tahun 1978 dengan Kepala unit pertama ialah Ir.Suherman Buhron sampai tanggal 21 Juli 1981.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian yang tertanggal 11 Juni 1981 No.493/Kpts/Op/6/1981 Kepala Unit Perum Perhutani Jawa Barat dijabat oleh bapak Ir.Moch Haerani sampai tanggal 3 Otober 1987(Kepala Unit yang ke II). Berdasarkan surat Keputusan Menteri tanggal 31 Agustus 1987 No.110/Kpts/op/8/1987 Kepala Unit III Perum Perhutani Jawa Barat oleh Bapak Ir.Effendi Hasnan (Kepala Unit yang ke III). Berdasarkan surat Keputusan Menteri kehutanan RI pada tanggal 20 Desember 1988 No.64/kpts/Op/12/1988 terhitung serah terima tanggal 23 Januari 1989 dijabat oleh Ir.Mardjito Haknjosoebroto (Kepala Perum Ke IV). Pada waktu yang sama tahun 1978, Brigade Planologi Kehutanan Jawa Barat pun dilebur kedalam Perum Perhutani Biro Perencanaan Unit III Perum Perhutani Jawa Barat. Berdasarkan KePres No.20 tahun 1983 April 1983 tentang pembentukan Departemen Kehutanan dan sebagai Kehutanan yang pertama ialah Dr.Soejarwo termasuk dalam susunan kabinet pembangunan IV. Dengan terbentuknya Departemen Kehutanan maka tiap-tiap propinsi dibentuk pula kantor wilayah Departemen Kehutanan termasuk di Jawa Barat (Ka.KanWil yang pertama di Jawa Barat ialah R.Usman Mu'min B.Sc selanjutnya diganti olehIr.R.Suriadi Suradireja Pejabat Ka KanWil DepHut Jawa Barat).

Pemerintah No.2 tahun 1978 dengan Kepala unit pertama ialah Ir.Suherman Buhron sampai tanggal 21 Juli 1981.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian yang tertanggal 11 Juni 1981 No.493/Kpts/Op/6/1981 Kepala Unit Perum Perhutani Jawa Barat dijabat oleh bapak Ir.Moch Haerani sampai tanggal 3 Otober 1987(Kepala Unit yang ke II). Berdasarkan surat Keputusan Menteri tanggal 31 Agustus 1987 No.110/Kpts/op/8/1987 Kepala Unit III Perum Perhutani Jawa Barat oleh Bapak Ir.Effendi Hasnan (Kepala Unit yang ke III). Berdasarkan surat Keputusan Menteri kehutanan RI pada tanggal 20 Desember 1988 No.64/kpts/Op/12/1988 terhitung serah terima tanggal 23 Januari 1989 dijabat oleh Ir.Mardjito Haknjosoebroto (Kepala Perum Ke IV). Pada waktu yang sama tahun 1978, Brigade Planologi Kehutanan Jawa Barat pun dilebur kedalam Perum Perhutani Biro Perencanaan Unit III Perum Perhutani Jawa Barat. Berdasarkan KePres No.20 tahun 1983 April 1983 tentang pembentukan Departemen Kehutanan dan sebagai Kehutanan yang pertama ialah Dr.Soejarwo termasuk dalam susunan kabinet pembangunan IV. Dengan terbentuknya Departemen Kehutanan maka tiap-tiap propinsi dibentuk pula kantor wilayah Departemen Kehutanan termasuk di Jawa Barat (Ka.KanWil yang pertama di Jawa Barat ialah R.Usman Mu'min B.Sc selanjutnya diganti olehIr.R.Suriadi Suradireja Pejabat Ka KanWil DepHut Jawa Barat).

2.2 Tempat dan Kedudukan Perusahaan Umum

Dalam kesempatan ini penulis memilih Perum Perhutani Divisi Data dan Informasi yang bertempat dan berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 628 Km 11 Bandung 41116.

2.3 Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan Umum Kehutanan Negara

Perum perhutani adalah perusahaan umum kehutanan Negara, merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah naungan Departemen Kehutanan. Perum Perhutani Unit III Jawa Barat didirikan tanggal 10 Februari 1978 yang peresmiannya dilakukan oleh Menteri Pertanian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 121/kpts/Org/2/1978 tanggal 27 Februari 1978 Menteri Pertanian menetapkan pula perubahan Status, Brigade Planologi Kehutanan Jawa Barat Kepada Perum Perhutani dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 1978.

Dengan berdirinya Perum Perhutani Unit III Jawa Barat, maka untuk selanjutnya segala hak dan kewajiban kekayaan serta perlengkapan dari Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Jawa Barat Beralih kepada Perum Perhutani.

2.4 Organisasi dan pembagian wilayah Perusahaan umum Perhutani

Bidang atau Sifat usaha dari Perum Perhutani adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan dan kelestarian Sumber Daya Alam, serta menyelenggarkan usaha dibidang Kehutanan yang berupa barang dan jasa yang

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak serta untuk aktif melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999 Perum Perhutani mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan Perencanaan, Pengurusan, Pengusahaan dan Perlindungan Hutan di wilayah Kerjanya. Terdapat 9 Biro dalam melaksanakan mekanisme Kerja di Perum Perhutani, yaitu :

1. Biro Umum dan Sumber Daya Manusia yang membawahi :
   1.1 Seksi Umum
   1.2 Seksi Personalia
2. Biro Perencanaan Sumber Daya Hutan yang membawahi :
   2.1 Seksi Perencanaan umum
   2.2 Seksi perencanaan hutan
   2.3 Seksi prasarana
   2.4 Seksi Pengukuran dan Perpetaan
   2.5 Seksi Perencanaan Hutan (SPH) I Bogor, SPH II Cianjur, SPH III Bandung dan SPH IV Cirebon.
3. Biro Produksi yang membawahi :
   3.1 Seksi Eksploitasi Kayu
   3.2 Seksi Eksploitasi Non Kayu
4. Biro Pembinaan Sumber Daya Hutan yang membawahi:
   4.1 Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi lahan

4.2 Pemeliharaan dan pembinaan lingkungan

5. Biro Keuangan, yang membawahi :

5.1 Seksi Data dan Informasi

5.2 Seksi Akuntansi

5.3 Seksi Anggaran.

6 Biro Perlindungan Sumber Daya Hutan yang membawahi:

6.1 Seksi Hukum dan Agraria

6.2 Seksi Keamanan

6.3 Seksi Humas

7 Biro Pemasaran yang membawahi:

7.1 Seksi Industri

7.2 Seksi Pengujian

7.3 Seksi Analisa Pasar

7.4 Seksi Perdagangan.

8 Biro Pengawasan, yang membawahi :

8.1 Seksi Pengawasan wilayah I dan Pengawasan wilayah II

9 Biro Industri yang membawahi :

9.1 Seksi Industri Kayu

9.2 Seksi Industri Non Kayu

Adapun pembagian wilayah Unit III Perum Perhutani Jawa Barat dan Banten terdiri dari 14 Kesatuan Pemangkuan hutan (KPH) yang masing – masing dipimpin oleh seorang administrator/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), ke 14 KPH itu kemudian dibagi-bagi lagi kedalam 108 bagian. Badan Kesatuan

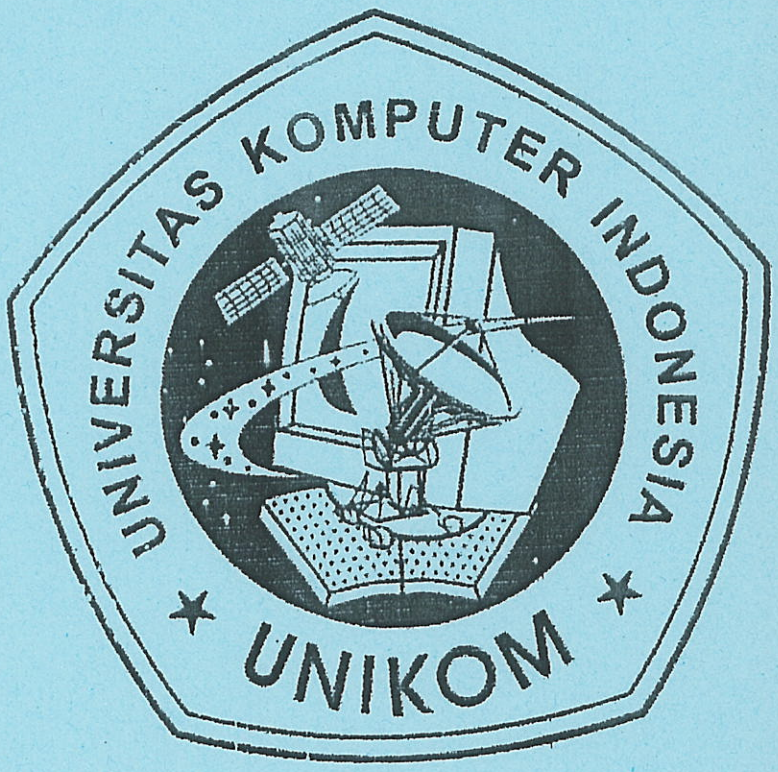
Pemangkuan Hutan (BKPH) masing-masing dipimpin oleh asisten Perhutani/KBPKH. Untuk wilayah yang lebih kecil lagi dibawah KBKPH adalah Resort Polisi Hutan (RPH), pada unit III Perum Perhutani ini berjumlah 386, masing-masing dipimpin oleh Kepala Resort Polisi Hutan.

2.5 Bidang Pekerjaan Divisi/Seksi Data dan Informasi

Penulis melaksanakan Kerja Praktek di Perusahaan Umum Perhutani unit III Jawa Barat dan Banten pada bagian Data dan Informasi. Divisi ini dibawah Seksi Keuangan yang mempunyai peran atau tugasnya sebagai berikut :

1. Ketua Seksi Data dan Informasi
2. Ajun Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data (PPD)
3. Ajun Kasi Bidang Analisa dan Penyajian Informasi (API)
4. Kepala Sub Seksi Pengumpul dan Pengolah Data (PPD)
5. Kepala Sub Seksi Analisa dan Pelaporan
6. Programmer Data Kemajuan Pekerjaan (DKP) dan sub Sistem Sumber daya Manusia (SS.SDM)
7. Programmer Data Kemajuan Pekerjaan dan Sub Sistem Sarana Prasarana (SS.Sarpra)
8. Programmer Sub Sistem Keuangan (SSK) dan Perangkat Komputer
9. Kepala Urusan Seksi SIM
10. staf pelaksana Sub Sistem Pengolah Data
11. Staf Pelaksana SS.perangkat Komputer
12. Staf Pelaksana Sub Seksi Analisa dan Pelaporan

KEPALA UNIT
WAKIL KEPALA UNIT
KEPALA BIRO PERENCANAAN
KASI PERENCANAAN UMUM
KASI PENGUKURAN & PERPETAAN
KASI PERENCANAAN PRASARANA HUTAN
KASI PERENCANAAN HUTAN DAERAH
KEPALA BIRO PEMBINAAN HUTAN
KASI REBOISASI & REHABILITASI HUTAN
KASI PEMELIHARAAN & PEMBINAAN LINGKUNGAN
KEPALA BIRO PRODUKSI
KASI EKSPLOITASI KAYU
KASI EKSPLOITASI NON KAYU
KEPALA BIRO INDUSTRI
KASI INDUSTRI KAYU
KASI INDUSTRI NON KAYU
KESATUAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU
KESATUAN PENGUSAHAAN SUTANA ALAM
P.LAK
P.S.A
PGT
PMKP
PGT
KEPALA BIRO PEMASARAN
KASI PENJUALAN HASIL HUTAN
KASI PENGUJIAN HASIL HUTAN
KASI ANALISA PASAR
KEPALA BIRO KEUANGAN
KASI ANGGARAN & PEMBELANJAAN
KASI DATA & INFORMASI
KASI AKUNTANSI
KEPALA BIRO TEKNIK & PERLENGKAPAN
KASI BANGUN-BANGUNAN
KASI INSTALASI
KASI PERLENGKAPAN
KEPALA BIRO KEAMANAN & AGRARIA
KASI KEAMANAN
KASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KASI HUKUM & AGRARIA
KEPALA BIRO UMUM
KASI PERSONALIA
KASI UMUM / PERKANTORAN


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM